

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menggambarkan tercapainya suatu proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi output, peningkatan jumlah konsumsi dan pendapatan.

Berkenaan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, maka keberadaan pos pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penyumbang kas daerah memiliki peranan penting. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber terbesar dari penerimaan yang dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan daerah. Arti penting pajak daerah bagi pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pungutan yang dilakukan oleh daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga, sedangkan retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atas badan dan jasa yang nyata dari pemerintah daerah, seperti pelayanan kerja, pertukaran barang, atas izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Soeratno dan Suparmono, 2002: 15).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penerimaan pemerintah yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

(fungsi budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Penerimaan pajak yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikompensasi oleh sistem pengeluaran anggaran pemerintah yang tepat, agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga (Sugiyanto, 1994: 18).

Dengan diberikannya otonomi yang lebih luas kepada daerah Kabupaten dan daerah Kota melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka dalam struktur pemerintah mengenal adanya daerah otonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu daerah otonom di Indonesia yang memiliki realisasi penerimaan daerah tertinggi di antara daerah otonom lainnya khususnya di Pulau Sumatra ialah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari data berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi**  
**(juta rupiah) Tahun 2000-2003**

No	Propinsi	Tahun			
		2000	2001	2002	2003
1.	NAD	269.180	515.722	1.537.526	1.522.155
2.	Sumatra Utara	600.280	1.066.804	1.179.913	1.162.034
3.	Sumatra Barat	293.597	468.516	561.809	539.729
4.	Riau	<b>636.354</b>	<b>1.592.629</b>	<b>2.129.632</b>	<b>1.968.365</b>
5.	Jambi	194.981	296.735	449.304	412.794
6.	Sumatra Selatan	330.345	674.443	806.171	957.634
7.	Bengkulu	141.347	193.627	236.937	288.834
8.	Lampung	261.153	453.333	661.068	649.204

Sumber dari: data BPS.

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai realisasi penerimaan daerah dari 8 (delapan) provinsi di Sumatra, Provinsi Riau merupakan provinsi yang paling besar realisasi penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Dengan besarnya penerimaan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Riau menandakan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Salah satu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah ialah dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengetahui PDRB di Pulau Sumatera pada tahun 2004-2006 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**  
**Menurut Provinsi (Jutaan Rupiah)**

<b>Provinsi</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Nanggroe Aceh Darusalam	40.374.282,30	36.287.915,29	37.158.868,55
Sumatera Utara	83.328.948,58	87.897.791,21	93.330.108,26
Sumatera Barat	27.578.136,56	29.159.480,53	30.949.945,10
<b>Riau</b>	<b>75.216.719,28</b>	<b>79.287.586,75</b>	<b>83.370.867,24</b>
Jambi	11.953.885,47	12.619.972,18	13.363.620,73
Sumatera Selatan	47.344.395,00	49.633.536,00	52.125.287,00
Bengkulu	5.896.255,33	6.239.364,35	6.610.625,72
Lampung	28.262.288,53	29.397.248,40	30.847.023,03
Kep. Bangka Belitung	8.414.980,21	8.706.800,18	9.009.890,59
Kep. Riau	28.509.063	30.381.500,21	32.411.003,07

Sumber dari: Data BPS, 2006

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Provinsi Riau sebagai provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki PDRB yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan pertahunnya. Hal ini yang menjadikan Provinsi Riau begitu istimewa di Pulau Sumatera bahkan di Indonesia. Keistimewaan Provinsi Riau juga didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan perkebunan kelapa sawit, karet dan ladang minyak bumi yang berada

dalam kawasan Provinsi Riau. Tercatat luas areal kebun kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 1.481.399 hektar, kebun karet 499.255 hektar dan produksi minyak bumi yang mencapai 181, 30 Juta Barrel (Riau dalam Angka, 2004:124).

Provinsi Riau saat ini terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, 9 (Sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Bengkalis Kuantan Singingi, Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir sedangkan Kota terdiri dari Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang terkaya di Sumatera, di mana potensi ekonomi daerahnya masih banyak mengandung sumber pendapatan pada pengelolaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Namun, jika sumber daya alam dipergunakan secara berlebihan maka akan merugikan bagi pembangunan ekonomi daerah, seperti pengeboran minyak yang terlalu berlebihan. Minyak bumi merupakan salah satu potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah karena minyak bumi dapat dikenakan pajak.

Sebagai fokus dari penelitian maka penulis mengambil 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Pekanbaru. Penetapan 5 (lima) Kabupaten/Kota ini sebagai fokus penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa semenjak Provinsi Riau berdiri, kelima Kabupaten/Kota inilah yang masih eksis hingga sekarang. Artinya, dengan perkembangan sistem

pemerintahan di Indonesia, terjadi fenomena pemekaran daerah dan ada pula yang ingin memisahkan dari daerah sebelumnya dan hal ini juga terjadi pada Provinsi Riau.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau berkenaan dengan perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB suatu daerah diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang merata melalui optimalisasi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *trend* perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah elastisitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *trend* perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2. Untuk mengetahui elastisitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai referensi bagi pemerintah untuk melengkapi kajian dan studi mengenai peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu dari indikator pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai sumber bahan bacaan yang bermanfaat dalam menambah wawasan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi tambahan khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di 5 (lima) Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 1991-2006.

##### **1.5.2 Definisi Operasional**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

###### **1.5.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).**

PDRB merupakan nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu wilayah pada umumnya dalam jangka

waktu satu tahun (Todaro, 1997:38). PDB pada dasarnya dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa (BPS, 2006:10). Untuk menghitung PDRB riil Provinsi Riau digunakan rumus sebagai berikut:

$$PDRB_{riil\ t} = \frac{PDRB_{nominal\ t}}{IHK_t} \times 100$$

Di mana:

$PDRB_{riil\ t}$  : Produk Domestik Regional Bruto riil pada tahun t.

$PDRB_{nominal\ t}$  : Produk Domestik Regional Bruto nominal pada tahun t.

$IHK_t$  : Indek Harga Konsumen pada tahun t.

### 1.5.2.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Riau.

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005:1). Data mengenai realisasi penerimaan pajak daerah di 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Riau diperoleh dari data BPS mulai dari tahun 1991-2006. Nilai realisasi yang diperoleh dari laporan anggaran pemerintah daerah merupakan nilai berdasarkan harga berlaku. Untuk merubah ke dalam nilai berdasarkan harga konstan tahun 2000 dapat digunakan rumus sebagai berikut (Arnold, 2002: 148):

$$TX_{riil} = \frac{TX_t \text{ Harga Berlaku}}{IHK_t} \times 100$$

Di mana:

$TX_{t \text{ riil}}$  : Total realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Provinsi Riau berdasarkan harga konstan (jutaan Rupiah) pada tahun tertentu.

$TX_t \text{ Harga Berlaku}$  : Realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah provinsi Riau berdasarkan harga berlaku (jutaan Rupiah) pada tahun tertentu.

$IHK_t$  : Indeks Harga Konsumen (Provinsi Riau) pada tahun tertentu dengan tahun dasar 2000.

### 1.5.2.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Provinsi Riau.

Dijelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Prakosa, 2005:92) Data mengenai realisasi penerimaan pajak daerah di 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Riau diperoleh dari data BPS mulai dari tahun 1991-2006. Dalam hal ini nilai realisasi yang diperoleh dari laporan anggaran pemerintah daerah merupakan nilai berdasarkan harga berlaku. Untuk merubah kedalam nilai berdasarkan harga konstan tahun 2000 dapat digunakan rumus sebagai berikut:



$$RT_{x \text{ riil}} = \frac{RT_x \text{ Harga Berlaku}}{IHK_t} \times 100$$

Di mana:

- $RT_{x \text{ riil}}$  : Total realisasi penerimaan retribusi daerah pemerintah provinsi Riau berdasarkan harga konstan (jutaan Rupiah) pada tahun tertentu.
- $RT_x \text{ Harga Berlaku}$  : Realisasi penerimaan retribusi daerah pemerintah provinsi Riau berdasarkan harga berlaku (jutaan Rupiah) pada tahun tertentu.
- $IHK_t$  : Indeks Harga Konsumen (Provinsi Riau) pada tahun tertentu dengan tahun dasar 2000.

### 1.5.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *trend* data runtut waktu digunakan untuk mengetahui proyeksi dan ketersediaan dana di masa datang. Variabel pajak daerah dan retribusi daerah akan dihitung proyeksi tahunnya, sehingga pemerintah daerah dapat mendeteksi awal ketersediaan dana setiap tahunnya. Arti penting dari *trend* adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. *Trend* yang meningkat disebut *trend* positif dan *trend* yang menurun disebut *trend* negatif. *Trend* menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil.

Dalam penelitian ini persamaan *trendnya* adalah sebagai berikut (Boedijoewono, 2007:232).

$$Y' = a + bX$$

Nilai a dan b dicari berdasarkan 2 persamaan sebagai berikut:

$$\Sigma Y = Na + b\Sigma X$$

$$\Sigma XY = a\Sigma X + b\Sigma X^2$$

Karena  $X = 0$  (tahun ditengah = 0), maka persamaan di atas menjadi:

$$\Sigma Y = Na \quad a = \Sigma Y/N$$

$$\Sigma XY = b\Sigma X^2 \quad b = \Sigma XY/\Sigma X^2$$

Di mana:

$Y'$  : nilai tren (nilai variabel dependen)

$X$  : nilai variabel independen dalam analisis tren adalah waktu.

$a$  : *intercept*  $Y$ , yakni Nilai  $Y$  apabila  $X=0$

$b$  : nilai kemiringan yaitu tambahan nilai  $Y$ , apabila  $X$  bertambah satu satuan.

Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, *variabel tak bebas*, pada satu atau lebih variabel lain, *variabel yang menjelaskan (explanatory variables)* (Gujarati, 1978:12). Berkaitan dengan penelitian ini, maka elastisitas pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Riau terhadap PDRB menggunakan teknik regresi linear berganda. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan bentuk logaritma dengan bilangan pokok  $e$  yang telah dilakukan dan diuji sebelumnya oleh Suparmono dalam meneliti

urgensi pajak daerah dan penghasilan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DIY dengan model sebagai berikut (Suparmono, 2002:16):

$$\text{LnPAD} = \text{Lna}_1 + b_1 \text{Ln Pajak Daerah}$$

$$\text{LnPAD} = \text{Lna}_2 + b_2 \text{Ln Retribusi Daerah}$$

Untuk penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{LnPDRB}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \text{Ln TX}_t + \hat{\beta}_2 \text{Ln RT}_{xt} + \hat{u}_t$$

Di mana :

PDRB : Produk Regional Domestik Bruto.

TX : pajak daerah

RT<sub>x</sub> : retribusi daerah.

Ln : merupakan logaritma natural (yaitu dengan bilangan dasar  $e$ , di mana  $e = 2,718$ ).

t : tahun.

$\hat{\beta}_0$  : konstanta.

$\hat{\beta}_1$  : koefisien pajak daerah.

$\hat{\beta}_2$  : koefisien retribusi daerah.

$\hat{u}$  : variabel Pengganggu.

Untuk mendukung metode penelitian ini, langkah-langkah pengujian terdiri atas tahap-tahap dalam uji asumsi klasik dan tahap-tahap dalam uji statistik yang akan dibahas berikut ini.

### 1.5.3.1 Uji Asumsi Klasik

Langkah pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik atau uji asumsi klasik digunakan untuk menjelaskan adanya suatu fenomena ekonomi secara lebih akurat, yaitu dengan memperhatikan adanya kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap asumsi klasik. Adapun urutan ataupun tahapan dalam uji asumsi klasik adalah autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Bila dalam pengujian dijumpai adanya pelanggaran, maka sesuai dengan ketentuan harus diperbaiki terlebih dahulu dengan menggunakan metode-metode perbaikan tertentu sebelum dilakukan langkah uji statistik.

#### 1.5.3.1.1 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara setiap objek observasi ( $n$ ) dalam *time series data* dan *cross section data*. Secara matematis dapat diformulasikan dengan  $E(u_i u_j) \neq 0, i \neq j$ . Bila autokorelasi dibiarkan, maka *confidence interval* menjadi semakin besar. Uji t dan uji F menjadi tidak akurat. Selanjutnya, pengambilan keputusan akan menjadi salah (Gujarati,2003:433).

Metode yang digunakan penelitian untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation Lagrange Multiplier*. Untuk menjelaskan metode ini, kita menggunakan model regresi sederhana  $y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t$ . Dalam aplikasi, dapat dimasukan lebih dari satu variabel independen. Selanjutnya, untuk mendapatkan residual persamaan di atas, dibentuk persamaan:

$$e_t = p_1 e_{t-1} + p_2 e_{t-2} + \dots + p_p e_{t-p} + v_t$$

Prosedur untuk melakukan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation Lagrange Multiplier* adalah:

1. Estimasi persamaan dan dapatkan residual
2. Regresi residual  $e_t$  dengan variabel independen  $X_t$  dan lag dari residual  $e_{t-1}, e_{t-2}, \dots, e_{t-p}$ . Langkah ini dapat diformulasikan dengan persamaan  $\hat{e}_t = \lambda_0 + \lambda_1 X_t + p_1 \hat{e}_{t-1} + p_2 \hat{e}_{t-2} + \dots + p_p \hat{e}_{t-p} + v_t$  dan dapat  $R^2$  dari regresi persamaan.
3. Jika sampel besar, model akan mengikuti distribusi *Chi-squares* dengan *df* sebanyak  $P$ . Nilai hitung *Chi-squares* dapat dicari dengan menggunakan formula  $(n-p) R^2 \approx X_p^2$
4. penentuan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan membandingkan  $(n-p) R^2$  dengan *chi-squares* pada derajat kepercayaan tertentu. Bila  $(n-p) R^2$  lebih besar dari *chi-squares*, maka terdapat autokorelasi. Penelitian ini dapat menggunakan nilai probabilitas *chi-squares* dibandingkan dengan tingkat signifikan. Bila probabilitas *chi-squares* lebih besar dari tingkat signifikansi, maka tidak terdapat autokorelasi.

### 1.5.3.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan meregresikan kuadrat dari nilai residual terhadap semua variabel bebas. Jika koefisien regresi masing-masing variabel bebas tidak signifikan, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas

(Sumodiningrat, 1995:270). Dengan uji-White menggunakan teknik regresi  
 auksiliari untuk membentuk persamaan atau model uji-White. Tahapan uji-  
 White adalah (Gujarati, 2003: 413-414):

- a. Melakukan estimasi terhadap persamaan modal utama, yaitu modal pada persamaan diatas untuk mendapatkan nilai residual yang selanjutnya disimpan dengan nama RESWt.
- b. Melakukan estimasi terhadap persamaan uji-White sebagai berikut:

$$(\text{RESW})^2 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \text{Ln TX}_t + \hat{\beta}_2 \text{Ln TX}_t^2 + \hat{\beta}_3 \text{Ln TX}_t \times \text{Ln RT}_x + \hat{\beta}_4 \text{Ln RT}_x + \hat{\beta}_5 \text{Ln RT}_x^2 + \hat{u}$$

- c. Menentukan hipotesis nol ( $H_0$ ):

$H_0$  tidak terdapat heteroskedastisitas

Untuk menyatakan menolak atau tidak menolak  $H_0$  digunakan ketentuan yang terdapat pada distribusi *chi-square* ( $x^2$ ). Besarnya sampel pengamatan ( $n$ ) dan nilai  $R^2$  mengikuti pola distribusi *chi-square* dengan derajat kebebasan atau *degree of freedom* (df) sebanyak variabel independent tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Adapun rumus untuk menghitung  $x^2$  di mana:

$$n \cdot R^2 \sim x^2_{df}$$

Di mana:

$n$  : banyaknya pengamatan

$R^2$  : koefisien determinasi

$x^2$  : *chi-square*

df : derajat kebebasan.

d. Jika nilai *chi-square* hitung yang diperoleh dari rumus di atas lebih besar daripada batas kritisnya pada tingkat signifikansi tertentu, maka kesimpulan yang diperoleh adalah menolak hipotesis  $H_0$  atau dinyatakan terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai *chi-square* lebih kecil daripada batas kritisnya, maka tidak menolak  $H_0$  atau dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Jika  $\beta$  ternyata signifikan secara statistik, maka berarti terdapat heteroskedastisitas dalam data dan sebaliknya apabila  $\beta$  tidak signifikan, maka dapat menerima asumsi heteroskedastisitas (Sumodiningrat, 1995:271).

#### 1.5.3.1.3 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas berhubungan secara linier dalam model yang digunakan. Apabila hubungan antara semua atau beberapa variabel bebas sangat erat, berarti terjadi multikolinearitas, akibatnya penaksiran menjadi terlalu besar sehingga t-hitung menjadi terlalu kecil dan tidak signifikan (Sumodiningrat, 1995:281). Dalam hal ini variabel-variabel tersebut tidak orthogonal, variabel yang bersifat orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara sesamanya sama dengan 0 (Gujarati, 2003:342). Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dipilih menggunakan metode parsial atau melakukan

pengujian dengan *auxiliary regression*. Adapun model uji *auxiliary* untuk model linear ditulis sebagai berikut:

$$TX=f(RTx)$$

Kriteria sederhana untuk menentukan multikolinearitas adalah dengan memperhatikan signifikansi nilai statistik dari F dan t. Jika keduanya menghasilkan nilai yang tidak signifikan, maka tidak terjadi bentuk pelanggaran multikolinearitas. Metode penelitian alternative yang dikenal dengan *klien's rule of thumb*, jika nilai  $x^2$  hasil regresi dari *auxiliary* lebih kecil daripada  $R^2$  model awal maka multikolinearitas yang terjadi dikatakan tidak bermasalah atau dapat diabaikan (Gujarati, 2003:361).

### 1.5.3.2 Uji Statistik

Uji statistik atau disebut juga uji orde pertama (*first order test*) merupakan bagian dari tahapan-tahapan metode penelitian yang terdiri uji-F, uji-t atau uji individu koefisien determinasi atau disebut juga  $R^2$ , atau disebut juga uji secara simultan, dan adapun penjelasannya diterangkan berikut ini.

#### 1.5.3.2.1 Uji-F

Modal persamaan dalam regresi dihasilkan dari perhitungan dengan menggunakan data masa lalu. Dengan dasar tersebut paling tidak akan terjadi penyimpangan dari hasil sebenarnya. Seberapa baik tidaknya persamaan regresi dalam memprediksi dapat dilihat dari deviasi hasil prediksi dengan data sebenarnya.



Hipotesis yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah:

Ho : kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.

Ha : kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen signifikan.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F. Kriteria yang digunakan adalah

sebagai berikut:

1. Menolak Ho, jika nilai F-hitung lebih besar daripada nilai F-tabel atau jika nilai probabilitas F-hitung lebih kecil dari tingkat signifikansi.
2. Menerima Ho, jika nilai F-hitung lebih kecil daripada nilai F-tabel atau jika nilai probabilitas F-hitung lebih besar dari tingkat signifikansi.

Nilai F-hitung dicari dengan menggunakan tingkat kepercayaan tertentu dengan formulasi (Sumodiningrat, 1996 : 422).

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Di mana :

$R^2$  : besarnya koefisien determinasi

n : banyaknya pengamatan atau observasi

k : jumlah variabel independen

### 1.5.3.2.2 Uji-t

Hasil analisis regresi berupa persamaan regresi dengan masing-masing koefisien perlu diuji untuk menentukan signifikansi koefisien. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel dalam regresi secara individu signifikan dalam memprediksi nilai variabel dependen. Hipotesis untuk menguji signifikansi koefisien persamaan regresi secara individu adalah sebagai berikut:

Ho : Koefisien Variabel independent tidak signifikan.

Ha : Koefisien variabel independent signifikan

Untuk pengujian koefisien variabel independent juga menggunakan hipotesis yang sama.

kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Ho diterima jika t-hitung lebih kecil daripada t-tabel atau jika probabilitas t-hitung lebih besar dari tingkat signifikansi.
2. Ha diterima jika t-hitung lebih kecil daripada t-tabel atau jika probabilitas t-hitung lebih kecil dari tingkat signifikansi.

Nilai t-hitung dapat dicari dengan rumus di bawah ini, yang kemudian diuji dengan menggunakan derajat kepercayaan ( $\alpha$ ) pada level tertentu (Sumodiningrat, 2002: 178).

$$t\text{-hitung} = \frac{\hat{\beta}}{se(\hat{\beta})}$$

Di mana:

t : nilai statistik

$\hat{\beta}$  : koefisien regresi dari nilai variabel independen

$se(\hat{\beta})$  : nilai standar error dari variabel independen

### 1.5.3.2.3 Koefisien Determinasi $R^2$

Koefisien determinasi atau  $R^2$  dikatakan sebagai ukuran kesesuaian yang baik atau *goodness of fit*. Koefisien determinasi merupakan ukuran ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel dalam mencocokkan penyebaran datanya (Gujarati, 2003: 212). Nilai koefisien determinasi yang dinyatakan sebagai  $R^2$  menerangkan variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi yang terdapat variabel bebas. Nilai koefisien determinasi yang dinyatakan sebagai  $R^2$  dapat dihitung dengan rumus (Sumodiningrat, 1994: 125-126):

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} = \frac{ESS}{TSS} = 1$$

Di mana :

$R^2$  : koefisien determinasi

RSS : jumlah kuadrat residual

ESS : jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS : jumlah total kuadrat

Jika  $R^2$  sebesar satu, berarti ada kecocokan sempurna antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Jika  $R^2$  bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Kecocokan suatu model dikatakan lebih baik jika  $R^2$  semakin mendekati 1 (satu).

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran teoritis, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TEORI**

Bab ini akan membahas mengenai teori tentang pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah.

### **BAB III PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU**

Bab ini menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian Provinsi Riau secara umum dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan analisis data menerangkan hasil analisis yang dilakukan dan disertai pembahasan terhadap hasil yang diperoleh.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.